

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BASSIANG KECAMATAN PONRANG SELATAN KABUPATEN LUWU

Aviliani¹, Dandan Haryono², Mustainah³, Intam Kurnia⁴

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tadulako^{1,2,3,4}

Corresponding Author: b10124115@untad.ac.id^{1*}

Info Artikel

Submitted: 19 Maret 2026

Revised : 31 Maret 2026

Accepted: 19 April 2026

Published: 23 April 2026

Keywords: Family Hope Program (PKH), program effectiveness, Edy Sutrisno, Bassiang Village, Luwu Regency

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), efektivitas program, Edy Sutrisno, Desa Bassiang, Kabupaten Luwu

Abstract

This study analyzes the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in Bassiang Village, Ponrang Selatan Sub-District, Luwu Regency, using Edy Sutrisno's (2007) five-dimensional framework. A qualitative approach with in-depth interviews with related informants reveals that PKH is overall effective. Program understanding dimension is optimal through MUSDES and monthly P2K2 socialization, with high comprehension of objectives, DTSEN decile 1-4 requirements, and regulations under Inpres No. 4/2024 and Permensos No. 22/2026, without significant obstacles. Targeting accuracy is achieved via formal channels (Musdes-SIKS-NG) and independent routes (Cek Bansos), precisely reaching underprivileged families. Disbursement is on time, following the Ministry of Social Affairs' simultaneous schedule, supported by digital notifications and face-to-face communication without delays. Goal achievement is evident from improved access to education, health services, and gradual poverty reduction, while tangible changes include healthier lifestyles, heightened education awareness, and sustained local purchasing power. These findings contrast with prior studies like Erika Dwi Nanda (2024), which identified targeting inaccuracies, underscoring the influence of local factors on PKH effectiveness. Implications: Strengthening digital verification and ongoing socialization is recommended for replication in similar regions.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, menggunakan kerangka lima dimensi Edy Sutrisno (2007). Pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap narasumber terkait menunjukkan bahwa PKH berjalan efektif secara keseluruhan. Dimensi pemahaman program optimal melalui sosialisasi MUSDES dan P2K2, dengan pemahaman tinggi terhadap tujuan, syarat DTSEN desil 1-4, serta regulasi Inpres No. 4/2024 dan Permensos No. 22/2026 tanpa kendala signifikan. Tepat sasaran tercapai via jalur formal (Musdes-SIKS-NG) dan mandiri (Cek Bansos), menasar keluarga kurang mampu secara akurat. Penyaluran tepat waktu mengikuti jadwal Kementerian Sosial secara serentak, didukung pemberitahuan digital dan tatap muka tanpa keterlambatan. Tercapainya tujuan terbukti dari peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan bertahap, sementara perubahan nyata mencakup pola hidup sehat, kesadaran pendidikan, dan daya beli ekonomi lokal. Hasil ini kontras dengan penelitian terdahulu seperti Erika Dwi Nanda (2024) yang menemukan ketidaktepatan sasaran, menegaskan pengaruh faktor lokal terhadap efektivitas PKH. Implikasi: Penguatan verifikasi digital dan sosialisasi berkelanjutan direkomendasikan untuk replikasi di wilayah serupa.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: *Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara*

Pendahuluan

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program unggulan Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial keluarga miskin serta rentan. PKH ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penetapan Penerima Manfaat PKH berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1-4. Regulasi ini menjadikan PKH sebagai instrumen strategis pemerintah pusat untuk mengurangi angka kemiskinan struktural, dengan persyaratan komponen keluarga (kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial) dan verifikasi melalui aplikasi SIKS-NG serta Cek Bansos.

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) masih bervariasi antarwilayah, dengan data nasional Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat angka kemiskinan terbuka sebesar 9,36% (25,92 juta jiwa), di mana PKH menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp 17,47 triliun (Kementerian Sosial, 2023). Berdasarkan metadata statistik BPS Kabupaten Luwu, jumlah KPM PKH di Kabupaten Luwu berjumlah 17.615 keluarga, merupakan bagian dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencakup 80.248 keluarga atau 246.084 jiwa (BPS Indonesia & DTKS Kabupaten Luwu, 2024). Namun, evaluasi BPS (2024) mengindikasikan penurunan kemiskinan hanya 0,45% pasca-PKH, sementara penelitian Erika Dwi Nanda (2024) menemukan ketidakefektifan di beberapa daerah akibat ketidaktepatan sasaran (30% penerima non-miskin) dan sosialisasi minim. Serupa, Erwin Maulana dan Puteri Anggarini Oktavianty (2023) melaporkan 25% data DTKS usang menyebabkan penyalahgunaan dana.

Didasarkan pada konsep efektivitas program Edy Sutrisno (2007:125-126), yang mengukur keberhasilan melalui lima dimensi: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Pendekatan ini selaras dengan definisi efektivitas Gibson (2001) sebagai tingkat pencapaian sasaran dan Sondang P. Siagian tentang optimalisasi sumber daya, di mana efektivitas PKH bergantung pada kesesuaian hasil dengan target (Makmur, 2008). Penelitian terdahulu seperti Wahyuni dkk. (2025) dan Novi Kadewi Sumbawati dkk. (2020) memperkuat bahwa variasi efektivitas dipengaruhi faktor lokal, sehingga penelitian ini relevan untuk menguji

kerangka tersebut di Desa Bassiang, Kabupaten Luwu.

Berdasarkan konfirmasi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas PKH di Desa Bassiang menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2019; Moleong, 2017), untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti guna meningkatkan dampak program secara berkelanjutan.

Landasan Teori

1. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) masih bervariasi di berbagai daerah. Penelitian Erika Dwi Nanda (2024) menemukan bahwa pelaksanaan PKH belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat permasalahan pada ketepatan sasaran dan kurangnya sosialisasi program. Hasil serupa juga ditemukan oleh Erwin Maulana dan Puteri Anggarini Oktavianty (2023) yang menyimpulkan bahwa program belum efektif akibat data penerima yang belum diperbarui, ketidaktepatan sasaran, serta adanya penyalahgunaan dana bantuan.

Di sisi lain, penelitian Wahyuni dkk. (2025) menunjukkan bahwa PKH tergolong efektif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat, meskipun masih terdapat potensi ketergantungan penerima terhadap bantuan. Sementara itu, Novi Kadewi Sumbawati dkk. (2020) menyimpulkan bahwa efektivitas PKH berada pada kategori cukup efektif, namun belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas PKH dipengaruhi oleh kondisi dan pelaksanaan program di masing-masing wilayah.

2. Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu usaha atau tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah kemampuan suatu kegiatan dalam menghasilkan hasil yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian target, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu. Sejalan dengan itu, Gibson (2001:120) menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati, di mana semakin tinggi tingkat pencapaiannya, maka semakin efektif suatu kegiatan tersebut.

Selain itu, Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Pendapat ini diperkuat oleh Soewarno Handyaningrat (1996:15) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Dengan demikian, efektivitas dapat disimpulkan sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal.

3. Konsep Efektivitas Program

Efektivitas program adalah tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai atau mendekati target yang direncanakan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu pelaksanaan.

Efektivitas program juga mencerminkan sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak atau perubahan nyata sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, efektivitas tidak hanya dilihat dari terlaksananya program, tetapi dari hasil dan manfaat yang dirasakan oleh sasaran program. Semakin besar kesesuaian antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas program tersebut. Efektivitas program merupakan penilaian terhadap tingkat kesesuaian program berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan, kemudian dibandingkan dengan pencapaian hasil program (Makmur, 2008:34).

Menurut Edy Sutrisno (2007:125-126), ada lima dimensi dalam mengukur efektivitas, yaitu:

- 1) PemahamanunProgram, yaitu pemahaman tentang program yang dijalankan dengan memahami aturan yang disebutkan dalam program.
- 2) Tepat Sasaran, yaitu sesuai objek yang dipilih.
- 3) Tepat Waktu, yaitu memahami aturan tentang waktu dan biaya program yang telah ditentukan.
- 4) Tercapainya Tujuan, yaitu peningkatan hasil setelah program dilaksanakan.
- 5) Perubahan Nyata, yaitu adanya peningkatan kinerja setelah program dilakukan.

4. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan tunai yang disertai kewajiban tertentu. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, PKH juga

diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan mendorong peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Manfaat PKH tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat. Program ini mendorong keluarga penerima manfaat untuk lebih memperhatikan pendidikan anak, kesehatan ibu dan anak, serta kondisi kesejahteraan sosial dalam keluarga. Dengan demikian, PKH diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara bertahap serta menciptakan kemandirian dalam jangka panjang.

Selain itu, terdapat skema khusus yaitu PKH Akses yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan sosial yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses, seperti wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar, daerah tertinggal atau terpencil dengan kondisi geografis sulit serta cuaca ekstrem, serta wilayah perbatasan antarnegara. Program ini bertujuan untuk memastikan pemerataan layanan sosial bagi masyarakat yang berada di wilayah sulit dijangkau.

Adapun kriteria penerima PKH ditujukan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang datanya bersumber dari Basis Data Terpadu. Penerima manfaat dibedakan ke dalam tiga komponen utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pada komponen kesehatan, sasaran meliputi ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, serta anak usia dini (0–6 tahun). Pada komponen pendidikan, sasaran mencakup anak usia sekolah dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau sederajat, hingga anak usia 6–21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sementara itu, pada komponen kesejahteraan sosial, sasaran meliputi lanjut usia serta penyandang disabilitas berat yang bergantung pada orang lain dalam aktivitas sehari-hari. Dengan kriteria tersebut, PKH diharapkan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, khususnya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program tersebut dilaksanakan. Metode kualitatif dipandang tepat karena mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan informan. Menurut Sugiyono (2019m), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta lebih menekankan pada makna daripada

generalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dalam konteks yang sebenarnya.

Sejalan dengan itu, Moleong (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, serta dideskripsikan dalam bentuk kata-kata pada konteks alamiah. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya data yang bersifat deskriptif dan mendalam, sehingga dapat mengungkap makna, proses, serta konteks sosial yang melatarbelakangi pelaksanaan PKH. Dengan demikian, metode kualitatif dinilai paling sesuai untuk mengkaji efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Bassiang Kabupaten Luwu secara menyeluruh.

Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Program

Dimensi pemahaman program, menurut Edy Sutrisno, menekankan pemahaman mendalam tentang tujuan, manfaat, dan aturan operasional program sebagai prasyarat keberhasilan. Pemahaman program merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, yang mencakup tingkat pengetahuan, persepsi, dan interpretasi pelaksana serta masyarakat terhadap tujuan, mekanisme, dan manfaat program. Dalam perspektif implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, komunikasi menjadi aspek krusial karena menentukan sejauh mana informasi program dapat dipahami secara tepat. Kurangnya pemahaman akibat komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan program serta menurunkan efektivitas pencapaian tujuan kebijakan.

Selain itu, pemahaman program juga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dan kapasitas pelaksana. Masyarakat yang memahami program cenderung lebih aktif terlibat, sedangkan pelaksana yang memiliki pemahaman baik mampu mengimplementasikan kebijakan secara tepat sesuai kondisi lokal. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman melalui sosialisasi, edukasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah strategis untuk memastikan program berjalan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal.

Di Desa Bassiang, dimensi ini tercapai secara optimal. Narasumber menjelaskan PKH sebagai "program bantuan sosial bersyarat" dari Kementerian Sosial yang bertujuan "mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya

di kalangan masyarakat miskin dan rentan". Pemahaman aturan juga kuat, mencakup syarat komponen PKH (minimal satu anggota keluarga di bidang kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial) dan pendaftaran di DTSEN desil 1-4 berdasarkan Inpres No. 4/2024 dan Permensos No. 22 Hukum 2026.

Strategi sosialisasi menjadi kunci keberhasilan, meliputi tatap muka via Musyawarah Desa (MUSDES) oleh pemerintah desa dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bulanan oleh pendamping PKH, yang tidak hanya administratif tapi juga edukatif tentang pemanfaatan bantuan. Tingkat pemahaman masyarakat dinilai "cukup tinggi baik secara administratif maupun pemahaman tentang apa itu PKH", tanpa kendala signifikan. Implikasinya, pemahaman ini menciptakan kepatuhan sukarela terhadap syarat bersyarat PKH, yang memperkuat dimensi lain seperti tepat sasaran dan tercapainya tujuan.

2. Tepat Sasaran

Dimensi tepat sasaran mengukur kesesuaian antara objek program dengan kriteria target, memastikan bantuan mencapai kelompok yang benar-benar membutuhkan. Tepat sasaran merujuk pada sejauh mana program benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak dan membutuhkan. Ketidaktepatan sasaran, seperti inclusion error (penerima yang tidak berhak) dan exclusion error (penerima yang seharusnya berhak tetapi tidak menerima), dapat mengurangi dampak program dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat, mekanisme verifikasi yang jelas, serta pengawasan yang baik agar program tidak hanya dipahami dengan baik, tetapi juga tepat dalam menjangkau sasaran yang dituju.

Hasil wawancara mengonfirmasi bahwa PKH di Desa Bassiang "telah berjalan efektif dan tepat sasaran dalam menysasar masyarakat kurang mampu sesuai syarat dan ketentuan". Proses pendataan terstruktur melalui dua jalur: (a) Jalur formal, warga melapor ke RT/RW atau kantor desa dengan KTP dan KK, dibahas di Musdes untuk verifikasi, lalu diinput ke aplikasi SIKS-NG oleh operator desa; dan (b) Jalur mandiri, via aplikasi Cek Bansos (unduh di Play Store, verifikasi biometrik dengan foto KTP dan selfie, menu "Daftar Usulan"). Mekanisme ini memastikan data akurat berdasarkan DTSEN, menghindari penyimpangan. Keterkaitan dengan dimensi pemahaman terlihat jelas, di mana sosialisasi MUSDES dan P2K2 mendukung verifikasi komunitas, sehingga meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas program.

3. Tepat Waktu

Edy Sutrisno mendefinisikan dimensi ini sebagai pemahaman dan kepatuhan terhadap jadwal serta biaya yang telah ditetapkan, untuk menghindari inefisiensi. Dimensi tepat waktu

berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan dan penyaluran program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu sangat penting terutama pada program yang bersifat bantuan sosial, karena keterlambatan dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, sistem distribusi yang efisien, koordinasi yang baik antar pelaksana, serta manajemen waktu yang optimal menjadi kunci agar program dapat berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang maksimal.

Di Desa Bassiang, penyaluran "mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial" secara serentak ke penerima manfaat. Pendamping PKH menegaskan "tidak ada keterlambatan" karena wewenang pusat, di mana "jadwal penyaluran bantuan PKH itu adalah wewenang dari pemerintah pusat yang disalurkan secara serentak". Pemberitahuan efektif melalui "penyampaian informasi secara langsung tatap muka atau memanfaatkan platform media sosial (grup-grup WhatsApp tertentu)", sementara upaya mitigasi tidak diperlukan karena "tidak ada kendala pada teknis jadwal penyaluran bantuan semua itu telah diatur dan ditetapkan oleh kewenangan pusat". Ketepatan ini didukung infrastruktur digital seperti SIKS-NG dan Cek Bansos, yang meminimalkan delay administratif dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

1. Tercapainya Tujuan

Menurut Edy Sutrisno (2007:125-126) menilai peningkatan hasil konkret pasca-implementasi, selaras dengan tujuan program. Dimensi tercapainya tujuan merupakan ukuran utama keberhasilan suatu program, yang menunjukkan sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Tercapainya tujuan tidak hanya dilihat dari tersalurkannya program, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, akses layanan, atau perubahan kondisi sosial. Oleh karena itu, evaluasi yang berkelanjutan dan berbasis indikator kinerja sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Di Desa Bassiang, dimensi ini tercapai secara signifikan, dengan PKH berhasil mencapai tujuan utama: "PKH telah memberikan dampak positif yang signifikan terutama pada bidang ekonomi dan pendidikan serta kesehatan masyarakat". Pendamping PKH menambahkan bahwa "angka kemiskinan setiap tahun menurun sesuai dengan tujuan utama Program Keluarga Harapan yaitu menekan angka kemiskinan". Secara spesifik, program memenuhi kebutuhan pendidikan anak (kontribusi nyata dalam menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu), akses kesehatan (kontribusi nyata dalam menjamin akses kesehatan

bagi keluarga kurang mampu), dan pengurangan kemiskinan (cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan secara perlahan dan bertahap).

Pencapaian ini terintegrasi dengan syarat bersyarat PKH, di mana pemahaman program (dimensi 1) memastikan utilisasi bantuan untuk prioritas seperti sekolah dan imunisasi, didukung verifikasi tepat sasaran (dimensi 2) via DTSEN. Dibandingkan penelitian Novi Kadewi Sumbawati dkk. (2020) yang menyimpulkan PKH "cukup efektif namun belum signifikan menurunkan kemiskinan", temuan lokal lebih positif berkat sosialisasi P2K2 dan kepatuhan jadwal (dimensi 3), mendukung tujuan nasional memutus rantai kemiskinan antargenerasi (Kementerian Sosial).

5. Perubahan Nyata

Dimensi perubahan nyata mengukur peningkatan kinerja atau transformasi kondisi setelah program berjalan. Perubahan nyata menekankan pada adanya dampak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai hasil dari pelaksanaan program. Perubahan nyata ini dapat berupa peningkatan kualitas hidup, perubahan perilaku, maupun perbaikan kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat. Dimensi ini menjadi penting karena keberhasilan program tidak hanya diukur dari proses dan output, tetapi juga dari outcome yang benar-benar terjadi di lapangan. Dengan demikian, program yang efektif adalah program yang mampu menghasilkan perubahan yang konkret, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Wawancara menunjukkan perubahan signifikan: "terdapat perubahan kondisi kehidupan yang cukup signifikan dalam hal pola hidup sehat dan pentingnya pengertian masyarakat tentang dunia pendidikan". Pengaruh sosial-ekonomi mencakup "peningkatan daya beli ekonomi masyarakat lokal, serta memberikan pemahaman tentang pola hidup sehat", dengan dampak positif nyata seperti "kepastian layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan daya beli masyarakat lokal tetap terjaga". Perubahan ini bersifat holistik, dari perilaku (pola hidup sehat) hingga ekonomi (daya beli), yang mencerminkan peningkatan kinerja jangka panjang sebagaimana dikemukakan Edy Sutrisno.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, berjalan efektif secara keseluruhan berdasarkan kerangka lima dimensi efektivitas Edy Sutrisno (2007). Pemahaman program optimal melalui sosialisasi intensif via Musyawarah Desa (MUSDES) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan

Keluarga (P2K2), dengan pemahaman tinggi terhadap tujuan PKH, syarat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4, serta regulasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2024 dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 22/2026, tanpa kendala signifikan. Dimensi tepat sasaran tercapai melalui jalur formal (Musdes-SIKS-NG) dan mandiri (Cek Bansos), memastikan bantuan menjangkau keluarga kurang mampu secara akurat. Penyaluran tepat waktu mengikuti jadwal serentak Kementerian Sosial, didukung pemberitahuan digital dan tatap muka tanpa keterlambatan.

Tercapainya tujuan terbukti dari peningkatan akses pendidikan dan kesehatan anak, serta pengurangan kemiskinan secara bertahap, sementara perubahan nyata mencakup pola hidup sehat, kesadaran pendidikan, dan peningkatan daya beli ekonomi lokal. Hasil ini kontras dengan penelitian terdahulu seperti Erika Dwi Nanda (2024) yang menemukan ketidaktepatan sasaran, serta Novi Kadewi Sumbawati dkk. (2020) yang menyatakan efektivitas "cukup efektif", menegaskan pengaruh faktor lokal seperti sosialisasi dan verifikasi digital terhadap keberhasilan PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia tahun 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Tunai.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Efektivitas*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2026 tentang Program Keluarga Harapan.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian dan pengembangan (research and development)*. Alfabeta.
- Afianti, Y. (2024). *Efektivitas penyelenggaraan e-government melalui aplikasi Polri Super App (Studi kasus pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)* [Laporan Penelitian Terapan, Universitas Islam Indonesia].
- Arnisa, H. (2024). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (mengurangi angka anak putus sekolah) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Azhary, I. B. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di

Kelurahan Sondakan. *Journal of Development and Social Change*, 5(2), 1-13.

Nanda, E. D. (2024). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung* [Skripsi, Universitas Lampung].

Tiwa, R. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi kebijakan dalam menangani kekacauan antar desa di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 339-350.

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Metadata: Khusus wilayah Kabupaten Luwu, jumlah DTKS 246.084 jiwa yang terdiri dari 80.248 keluarga*. Sirusa BPS. Diakses 19 April 2026, dari <https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/exporittoexcel/50191>

Bakulu, B., Pangkey, M., & Kolondam, H. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan sektor pendidikan di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101).

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2015). *Kajian Program Keluarga Harapan*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. (n.d.). *Cek Bansos Kemensos*. Diakses 19 April 2026, dari <https://cekbansos.kemensos.go.id/>